



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 205.1/180/ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA ADVOKASI/BANTUAN HUKUM
PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR 40/G/2018/PTUN. Mdo

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penegakan Supremasi Hukum, memperlancar kegiatan Advokasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah dan untuk lancarnya pelayanan Bantuan Hukum serta proses persidangan untuk memberikan keterangan/kesaksian di pengadilan dalam perkara Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Jasa Advokasi/Bantuan Hukum dan Biaya Saksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum Perkara Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2018/PTUN. Mdo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum dan Biaya Saksi Perkara Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2018/PTUN. Mdo

- KEDUA : Besaran Jasa Advokasi/Bantuan Hukum dan Biaya Saksi sebagaimana diktum KESATU sebagai berikut :
1. Jasa Advokasi/Bantuan Hukum sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per orang per 1 (satu) kali menghadiri sidang.
 2. Biaya Saksi :
 - a. Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per orang per perkara;
 - b. Saksi ahli sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per orang per perkara.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 Oktober 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA